

## **INDIKATOR KEBERHASILAN INDONESIA MENUJU BEBAS KORUPSI**

**Tisya Agistianda Putri**  
[tisyaagistianda393@gmail.com](mailto:tisyaagistianda393@gmail.com)  
Poltekes Kemenkes Riau

### **1. PENDAHULUAN**

Korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan di Indonesia karena berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari melemahnya pertumbuhan ekonomi hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperburuk kualitas pelayanan publik serta memperbesar ketimpangan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, baik melalui penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun melalui kebijakan transparansi dan reformasi birokrasi. Meskipun demikian, tingkat korupsi di Indonesia masih menjadi perhatian, sebagaimana tercermin dalam indeks persepsi korupsi yang menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan (Transparency International, 2023).

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana mengukur keberhasilan Indonesia dalam upaya menuju negara yang bebas dari korupsi. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilihat dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari perubahan sistem, budaya, dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan indikator yang jelas dan komprehensif sebagai tolok ukur dalam menilai sejauh mana upaya tersebut telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.

Penulisan esai ini bertujuan untuk menganalisis indikator-indikator yang dapat digunakan dalam menilai keberhasilan Indonesia menuju bebas korupsi. Selain itu, esai ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya indikator tersebut sebagai alat evaluasi kebijakan dan strategi

pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. Dengan adanya indikator yang terukur, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama mengawasi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Adapun tesis utama dalam esai ini adalah bahwa keberhasilan Indonesia menuju bebas korupsi dapat diukur melalui kombinasi indikator yang mencakup aspek penegakan hukum, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta peningkatan integritas budaya anti-korupsi. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem yang mampu mencegah serta menekan praktik korupsi secara berkelanjutan (Rose-Ackerman & Palifka, 2016; Transparency International, 2023).

## **2. TINJAUAN PUSTAKA / KARANGAN TEORI**

### **2.1 Konsep Utama**

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut aspek moral, sosial, dan kelembagaan dalam suatu negara. Secara umum, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini sejalan dengan pandangan Transparency International yang menegaskan bahwa korupsi mencakup berbagai praktik seperti suap, penggelapan, nepotisme, hingga penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks Indonesia, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pemberantasannya, pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, pencegahan, serta edukasi kepada masyarakat. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditangani atau pelaku yang dihukum. Diperlukan indikator yang lebih komprehensif untuk menilai sejauh mana perubahan sistemik telah terjadi.

Indikator keberhasilan menuju bebas korupsi merujuk pada ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi. Indikator ini meliputi aspek kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, misalnya melalui penurunan jumlah kasus korupsi atau peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi. Sementara secara kualitatif, indikator dapat dilihat dari meningkatnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, membaiknya kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Konsep transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam indikator tersebut. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan yang diambil. Menurut Mardiasmo (2018), kedua konsep ini merupakan pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi konsep penting, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pengawas aktif terhadap jalannya pemerintahan.

Dengan demikian, konsep utama dalam kajian ini menekankan bahwa keberhasilan Indonesia menuju bebas korupsi tidak dapat dilihat secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, serta budaya masyarakat.

## **2.2 Teori Pendukung**

Dalam memahami fenomena korupsi dan upaya pemberantasannya, beberapa teori digunakan sebagai landasan analisis. Salah satu teori yang paling relevan adalah teori *principal-agent*. Teori ini menjelaskan hubungan antara pihak pemberi mandat (*principal*), yaitu masyarakat, dengan pihak penerima mandat (*agent*), yaitu pejabat publik. Dalam kondisi ideal, agen seharusnya bertindak sesuai kepentingan *principal*. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan akibat adanya asimetri informasi dan lemahnya sistem pengawasan. Kondisi ini membuka peluang bagi agen untuk melakukan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi (Klitgaard, 1988). Oleh

karena itu, keberadaan sistem pengawasan yang kuat dan transparan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemberantasan korupsi.

Selain itu, teori *good governance* juga menjadi kerangka penting dalam kajian ini. Teori ini menekankan bahwa pemerintahan yang baik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. World Bank menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi karena menciptakan sistem yang terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Dalam konteks ini, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi dapat dilihat dari sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Teori berikutnya adalah teori *collective action*, yang menjelaskan bahwa korupsi dapat menjadi perilaku kolektif yang sulit diberantas jika sudah dianggap sebagai hal yang “normal” dalam suatu sistem. Dalam kondisi ini, individu cenderung tetap melakukan korupsi karena menganggap semua orang juga melakukannya. Oleh karena itu, perubahan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan norma sosial dan budaya (Persson et al., 2013). Teori ini menekankan pentingnya membangun budaya anti-korupsi sebagai indikator keberhasilan jangka panjang.

Selanjutnya, teori budaya organisasi juga memberikan kontribusi penting dalam memahami perilaku korupsi. Menurut Schein (2010), nilai, norma, dan kebiasaan dalam suatu organisasi dapat memengaruhi perilaku anggotanya. Jika suatu organisasi memiliki budaya yang permisif terhadap korupsi, maka praktik tersebut akan terus berulang. Sebaliknya, jika budaya integritas dan kejujuran ditanamkan secara kuat, maka potensi korupsi dapat ditekan. Oleh karena itu, perubahan budaya organisasi dan masyarakat menjadi bagian integral dalam upaya menuju Indonesia bebas korupsi.

Dengan menggabungkan berbagai teori tersebut, dapat dipahami bahwa korupsi merupakan fenomena multidimensional yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.

Tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui perbaikan sistem, penguatan kelembagaan, serta perubahan budaya.

### **2.3 Penelitian Relevan**

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Laporan yang dirilis oleh Transparency International (2023) melalui Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi rendah umumnya memiliki sistem pemerintahan yang transparan, lembaga hukum yang independen, serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Penelitian oleh Rose-Ackerman dan Palifka (2016) juga menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada reformasi kelembagaan yang mampu mengurangi peluang dan insentif untuk melakukan korupsi. Mereka menekankan pentingnya sistem yang transparan, mekanisme pengawasan yang efektif, serta adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bahwa indikator keberhasilan harus mencakup perubahan struktural dalam sistem pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan dalam pemberantasan korupsi, masih terdapat tantangan yang signifikan, seperti lemahnya integritas sebagian aparat, rendahnya kesadaran masyarakat, serta adanya resistensi terhadap reformasi birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kajian sebelumnya dengan menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang lebih terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan.

### **3. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **3.1 Analisis Bagian Pertama: Indikator Penegakan Hukum dan Efektivitas Lembaga Anti-Korupsi**

Salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan Indonesia menuju bebas korupsi adalah efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum yang kuat mencerminkan kemampuan negara dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menghukum pelaku korupsi secara adil dan transparan. Dalam hal ini, peran Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sangat penting sebagai institusi yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani kasus korupsi.

Keberhasilan penegakan hukum dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti jumlah kasus yang berhasil diungkap, tingkat keberhasilan penuntutan, serta efek jera yang ditimbulkan terhadap pelaku. Namun, jika dikaitkan dengan teori *principal-agent*, keberhasilan ini tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditangani, tetapi juga dari sejauh mana sistem mampu mencegah terjadinya korupsi sejak awal (Klitgaard, 1988). Artinya, jika kasus korupsi masih tinggi, maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum berjalan secara optimal.

Selain itu, laporan dari Transparency International (2023) menunjukkan bahwa negara dengan sistem hukum yang independen dan tidak terpengaruh kepentingan politik cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa independensi lembaga penegak hukum merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. Dalam konteks Indonesia, tantangan yang masih dihadapi adalah menjaga konsistensi dan independensi lembaga hukum agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik maupun kepentingan tertentu.

Dengan demikian, indikator penegakan hukum tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga pada kualitas sistem hukum secara keseluruhan, termasuk integritas aparat penegak hukum, transparansi proses peradilan, serta kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

### **3.2 Analisis Bagian Kedua: Transparansi, Akuntabilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)**

Transparansi dapat diwujudkan melalui keterbukaan akses informasi publik, seperti pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan pemerintah. Dengan adanya transparansi, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini sejalan dengan teori *principal-agent*, di mana transparansi berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, akuntabilitas menuntut setiap pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil. Dalam praktiknya, akuntabilitas dapat dilihat dari adanya laporan kinerja, audit keuangan, serta mekanisme evaluasi yang transparan. Jika akuntabilitas berjalan dengan baik, maka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang akan semakin kecil.

Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan sistem *e-government* memungkinkan proses administrasi menjadi lebih terbuka dan efisien, sehingga mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat secara signifikan menekan tingkat korupsi di berbagai negara.

Dengan demikian, indikator keberhasilan dalam aspek ini dapat dilihat dari meningkatnya keterbukaan informasi, membaiknya sistem pengawasan, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai hasil dari tata kelola yang lebih baik.

### **3.3 Analisis Bagian Ketiga: Partisipasi Masyarakat dan Budaya Anti-Korupsi**

Selain aspek struktural, keberhasilan Indonesia menuju bebas korupsi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, khususnya partisipasi masyarakat dan terbentuknya budaya anti-korupsi. Berdasarkan teori *collective action*, korupsi dapat menjadi perilaku yang sulit diberantas jika sudah dianggap sebagai hal yang biasa

dalam masyarakat (Persson et al., 2013). Oleh karena itu, perubahan budaya menjadi indikator penting dalam jangka panjang.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pelaporan tindakan korupsi, keterlibatan dalam pengawasan kebijakan publik, serta dukungan terhadap gerakan anti-korupsi. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula tekanan terhadap pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam hal ini, edukasi dan kampanye anti-korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat.

Selain itu, budaya anti-korupsi juga berkaitan dengan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang ditanamkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun lingkungan sosial. Menurut Schein (2010), budaya organisasi dan nilai-nilai sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu. Jika masyarakat memiliki toleransi yang rendah terhadap korupsi, maka praktik tersebut akan semakin sulit untuk berkembang.

Penelitian oleh Transparency International (2023) juga menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap bahaya korupsi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran aktif masyarakat.

Dengan demikian, indikator keberhasilan dalam aspek ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat, rendahnya toleransi terhadap praktik korupsi, serta terbentuknya budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi secara berkelanjutan.

#### **4.KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam menuju bebas korupsi tidak dapat diukur hanya dari satu

aspek, melainkan harus dilihat secara menyeluruh melalui berbagai indikator yang saling berkaitan. Rumusan masalah mengenai bagaimana mengukur keberhasilan tersebut dapat dijawab melalui empat indikator utama, yaitu efektivitas penegakan hukum, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta terbentuknya budaya anti-korupsi. Keempat indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana upaya pemberantasan korupsi telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Temuan utama dari analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum yang kuat saja belum cukup untuk memberantas korupsi jika tidak didukung oleh sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta rendahnya toleransi terhadap praktik korupsi menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi. Dari sisi jangka panjang, perubahan budaya dan nilai-nilai integritas dalam masyarakat juga memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya korupsi secara sistemik.

Implikasi dari kajian ini menunjukkan bahwa upaya menuju Indonesia bebas korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat sistem hukum, meningkatkan transparansi melalui pemanfaatan teknologi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan indikator yang lebih spesifik dan terukur agar evaluasi terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih akurat dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why anticorruption reforms fail— Systemic corruption as a collective action problem. *Governance*, 26(3), 449–471. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139962933>

Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan tahunan KPK 2023*. KPK. <https://www.kpk.go.id>